

**PERAN ALOKASI ANGGARAN PEMERINTAH DALAM UPAYA
PENGENTASAN KEMISKINAN DI SUMATERA BARAT**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Strata Satu (S1) Pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*



Oleh :

Fani Wulandari

2017/17060014

**ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2021

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Skripsi

Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Padang

**PERAN ALOKASI ANGGARAN PEMERINTAH DALAM UPAYA PENGENTASAN
KEMISKINAN DI SUMATERA BARAT**

Nama : Fani Wulandari

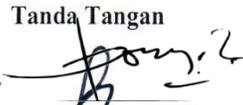
TM/NIM : 2017/17060014

Jurusan : Ilmu Ekonomi

Keahlian : Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan

Fakultas : Ekonomi

Padang, Maret 2022

Nomor	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua	Novya Zulva Riani, SE. M.Si	1. 
2.	Anggota	Drs. Alianis, MS	2. 
3.	Anggota	Ariusni, SE. M.Si	3. 

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**PERAN ALOKASI ANGGARAN PEMERINTAH DALAM UPAYA
PENGENTASAN KEMISKINAN DI SUMATERA BARAT**

Nama : Fani Wulandari

TM/NIM : 2017/17060014

Jurusan : Ilmu Ekonomi

Keahlian : Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan

Fakultas : Ekonomi

Padang, Maret 2022

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi

Disetujui oleh:

Pembimbing



Melti Roza Adry, SE, ME
NIP. 19830505 200604 2 001



Novya Zulva Riani, SE, M.Si
NIP. 19711104 200501 2 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Fani Wulandari
NIM/Tahun Masuk : 17060014/2017
Tempat/ Tanggal Lahir : M. Labuh/ 13 Februari 1999
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Keahlian : Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Gajah II Arah Pantai
No HP/ Telepon : 082285314720
Judul Skripsi : Peran Alokasi Anggaran Pemerintah Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Sumatera Barat

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis/skripsi saya ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar Akademik (Sarjana), baik di UNP maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis/skripsi ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis/skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini **Sah** apabila telah ditanda tangani **Asli** Tim Pembimbing, Tim Penguji dan Ketua Jurusan.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima **Sanksi Akademik** berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, November 2021



Fani Wulandari

NIM. 17060014

ABSTRAK

Fani Wulandari : Peran Alokasi Anggaran Pemerintah Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Sumatera Barat, di bawah bimbingan Ibu Novya Zulva Riani, SE. M. Si

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pengaruh alokasi dana desa terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Sumatera Barat (2) pengaruh anggaran pendidikan terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Sumatera Barat (3) pengaruh anggaran kesehatan terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Sumatera barat.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dan asositif. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder Sumatera Barat dalam bentuk data panel dari tahun 2017 sampai tahun 2020 dan data ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat. Dalam penelitian ini menggunakan model analisis regresi data panel yang diolah menggunakan Eviews9.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) alokasi dana desa berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di kabupaten Sumatera Barat (2) anggaran pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di kabupaten Sumatera Barat (3) anggaran kesehatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di kabupaten Sumatera Barat.

Kata Kunci: *Alokasi Dana Desa, Anggaran Pendidikan, Anggaran Kesehatan, Kemiskinan.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Alokasi Anggaran Pemerintah Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Sumatera Barat”.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat teratasi. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Teristimewa orang tua tercinta Ayahanda (Kalius) dan Ibunda (Almarhumah Asniwati) yang selalu memberikan motivasi, perhatian, serta doa terbaik untuk anaknya.
2. Untuk kakak dan abang ku yang telah memberikan motivasi dan perhatian semua ini untuk kalian, apapun yang saya lakukan untuk membahagiakan kalian.
3. Ibu Novya Zulva Riani, SE. M. Si selaku pembimbing penulis yang telah sabar dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran memberikan bimbingan, arahan, motivasi dan saran-saran yang sangat berharga serta penguji Bapak Drs. Alianis, MS dan Ibuk Ariusni, SE. M. Si.
4. Bapak Prof.Ganefri Ph.D selaku Rektor Universitas Negeri Padang.
5. Bapak Dr. Idris, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
6. Ibu Melti Roza Adry, SE. ME selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Negeri Padang dan Ibu Dewi Zaini Putri SE. M.M selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Negeri Padang.
7. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi yang telah memberikan banyak ilmu selama menjalankan masa perkuliahan, beserta kakak administrasi Jurusan Ilmu Ekonomi.
8. Untuk teman-teman kuliah saya yang bernama Elfira Reflina, Lusy Tania, Annisa Febriyani dan Ghiana Desanti terima kasih banyak telah berjuang bersama-sama dalam perskripsian ini dan selalu membantu saya dalam keadaan sedih dan senang. Dan maafkan kami (fani, lusy, cabel & ghiana) yang selalu merepotkan fira dalam perskripsian ini. Terima Kasih banyak bestieeee
9. Untuk teman-teman saya yang bernama Putri Melia, Dewi Dirgahayu, Rahmi Izzati, Nining Sundari, Noverma Liza dan Resti Larasati terima kasih telah mendengarkan kelukesh saya dan selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan perskripsian ini.

10. Untuk seluruh teman-teman jurusan Ilmu Ekonomi angkatan 2017 yang telah berpartisipasi dalam memberikan arahan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi.

Padang, November 2021

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GRAFIK.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	14
BAB II.....	15
KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS.....	15
A. Kajian Teori.....	15
1. Kemiskinan.....	15
2. Alokasi Anggaran Pemerintah.....	20
B. Penelitian Terdahulu.....	23
C. Kerangka Konseptual.....	28
D. Hipotesis.....	30
BAB III.....	31
METODE PENELITIAN.....	31
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	31
C. Jenis Data dan Sumber Data.....	31

D.	Teknik Pengumpulan Data.....	32
E.	Variabel Penelitian	32
F.	Defenisi Operasional Variabel	32
G.	Teknik Analisis Data	34
1.	Analisis Deskriptif	34
2.	Analisis Regresi Panel (<i>Pooled Analysis</i>)	34
BAB IV		41
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		41
A.	Gambaran Umum Wilayah Penelitian.....	41
B.	Deskripsi Variabel Penelitian.....	43
C.	Analisi Induktif	53
D.	Pembahasan Hasil Penelitian	62
BAB V.....		69
KESIMPULAN DAN SARAN.....		69
A.	Kesimpulan	69
B.	Saran	70
DAFTAR PUSTAKA.....		72
LAMPIRAN		77

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Persentase penduduk miskin menurut kabupaten/kota Sumatera Barat Tahun 2017-2019.....	44
Tabel 2. Alokasi dana desa kabupaten/kota Sumatera Barat 2017-2019.....	46
Tabel 3. Anggaran pendidikan kabupaten/kota Sumatera Barat 2017-2019	49
Tabel 4. Anggaran kesehatan kabupaten/kota Sumatera Barat 2017-2019.....	51

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten Sumatera Barat	2
Grafik 1.2 Persentase Penduduk Miskin Menurut Kota Sumatera Barat.....	3
Grafik 1.3 Jumlah Alokasi Dana Desa di Sumatera Barat	5
Grafik 1.4 Alokasi Anggaran Pendidikan di Kabupaten Sumatera Barat	7
Grafik 1.5 Alokasi Anggaran Pendidikan di Kota Sumatera Barat	8
Grafik 1.6 Alokasi Anggaran Kesehatan di Kabupaten Sumatera Barat	10
Grafik 1.7 Alokasi Anggaran Kesehatan di Kota Sumatera Barat	11

DAFTAR GAMBAR

Gambar Uji Chow.....	54
Gambar Uji Hausman	55
Gambar Uji Lagrange Multiplier	56
Gambar Uji Regresi Panel	58

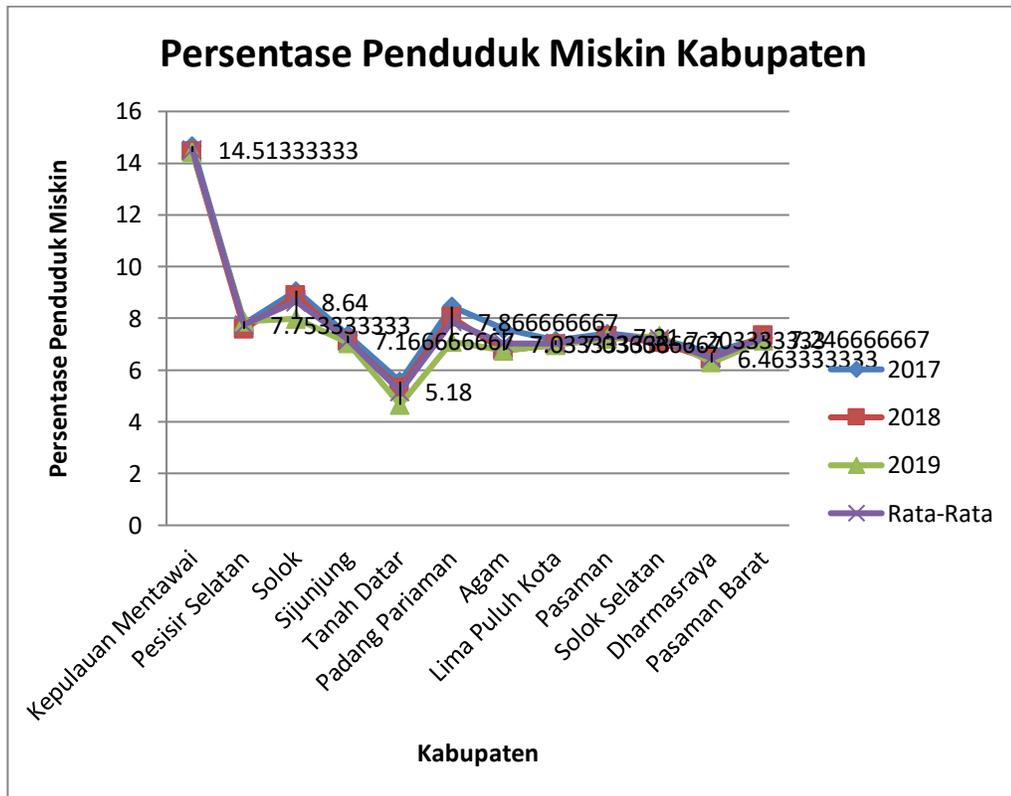
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan menjadi salah satu masalah ekonomi yang harus diberantas atau dikurangi oleh pemerintah secara lengkap, menjangkau seluruh sudut pandang kehidupan masyarakat dan dijalankan dengan tepat. Kemiskinan muncul saat individu maupun sekumpulan orang-orang tidak bisa memenuhi standar kesejahteraan kehidupan. Kemiskinan dipandang sebagai keadaan diri seorang atau sekelompok orang yang mengalami kekurangan (Zuber, 2011). Kemiskinan biasanya ditetapkan berdasarkan standar garis kemiskinan, menurut World Bank, (2000) mendefinisikan kemiskinan sebagai hilangnya kesejahteraan serta perihal kekurangan pendapatan minimum. Orang yang memiliki tingkat pendapatan di bawah garis kemiskinan atau jumlah pendapatan yang tidak cukup dalam memenuhi kebutuhan pokoknya maka dikategorikan masuk dalam kemiskinan absolut. Sedangkan kemiskinan yang di sebabkan oleh pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat sehingga terjadi peningkatan ketimpangan distribusi pendapatan antara golongan kaya dan golongan miskin masuk dalam kategori kemiskinan relatif (Sartika et al., 2016).

Grafik 1.1 Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten Sumatera Barat



Sumber Data : BPS Sumatera Barat

Berdasarkan grafik 1.1 diatas menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin Kabupaten di Sumatera Barat mengalami penurunan dari tahun 2017 sampai tahun 2019. Dilihat dari rata-rata persentase penduduk miskin yang tertinggi di kabupaten berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu rata-ratanya sebesar 14,51 persen, sedangkan rata-rata persentase penduduk miskin terendah di kabupaten berada di Kabupaten Tanah Datar yaitu rata-ratanya sebesar 5,18 persen.

Grafik 1.2 Persentase Penduduk Miskin Menurut Kota Sumatera Barat



Sumber Data: BPS Sumatera Barat

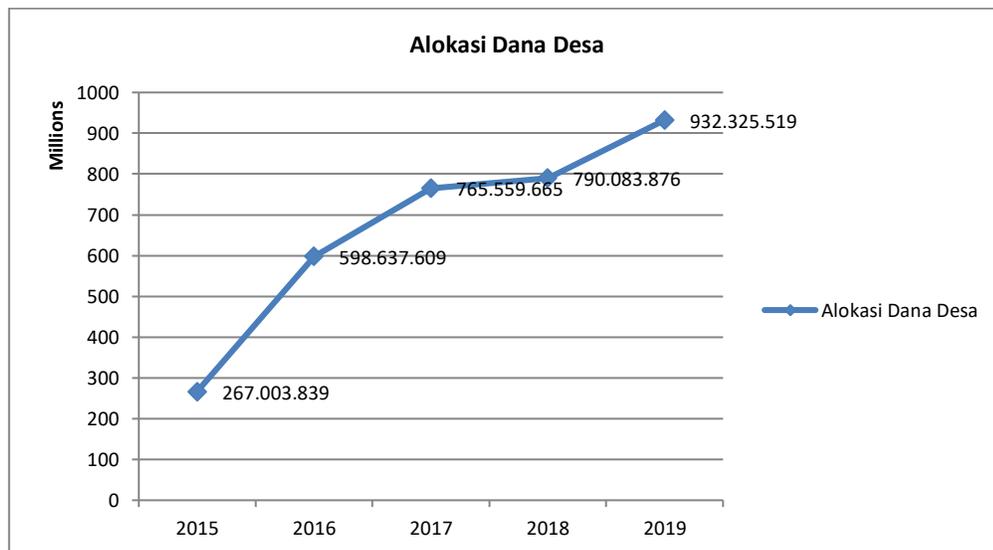
Berdasarkan grafik 1.2 diatas menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin Kota di Sumatera Barat mengalami penurunan dari tahun 2017 sampai tahun 2019. Dilihat dari rata-rata persentase penduduk miskin tertinggi di kota berada di Kota Padang Panjang yaitu sebesar 5,88 persen. Sedangkan rata-rata persentase penduduk miskin terendah di kota berada di Kota Sawah Lunto yaitu sebesar 2,19 persen.

BPS, (2019) mencatat bahwa kemiskinan di pedesaan lebih tinggi dibandingkan dengan kemiskinan di perkotaan, dimana penduduk miskin di pedesaan pada bulan maret 2019 sebanyak 7,88% turun menjadi 7,69% pada bulan september 2019, sedangkan penduduk miskin di perkotaan pada bulan maret 2019 sebanyak 4,76%

turun menjadi 4,71% pada bulan september 2019. Sehingga berbagai program pemerintah cenderung mengarahkan kepada pengurangan kemiskinan di pedesaan dalam bentuk program penanggulangan kemiskinan diantaranya : program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri, program keluarga harapan, subsidi beras untuk masyarakat miskin, bantuan siswa miskin, program askeskin/jamkesmas, program bantuan langsung tunai, dan program bantuan langsung sementara masyarakat, selain itu pemerintah juga memiliki program kebijakan alokasi dana desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 yang diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 yang memberikan kepastian hukum terhadap perimbangan keuangan desa dan kabupaten/kota. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintahan kabupaten untuk desa, yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Salah satu tujuan dari alokasi dana desa adalah untuk penanggulangi kemiskinan.

Grafik 1.3 Jumlah Alokasi Dana Desa di Sumatera Barat



Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatera Barat

Berdasarkan grafik 1.3 diatas terlihat bahwa ADD mengalami peningkatan pada tahun ke-tahun berikutnya. Pada tahun 2015 alokasi dana desa sebesar 267.003.839 dan pada tahun 2019 mencapai 932.325.519. Peningkatan ADD pada dasarnya meningkatkan pelaksanaan program alokasi dana desa yang dilaksanakan melalui biaya operasional penyelenggaraan pemerintah desa, bantuan modal usaha POKMAS (peran kelompok masyarakat), bantuan operasional PKK (pemberdayaan kesejahteraan keluarga), bantuan operasional posyandu serta bantuan penyaluran beras miskin desa.

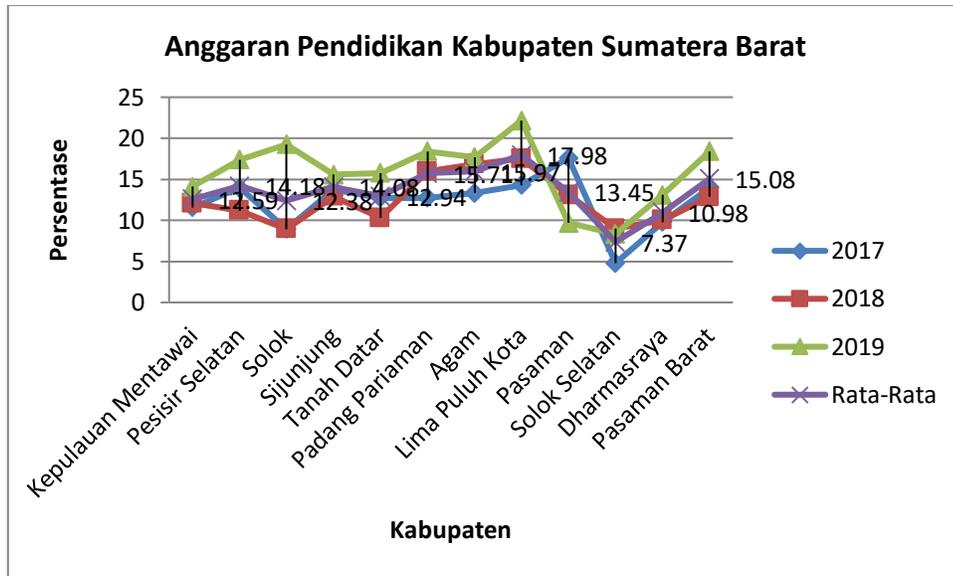
Menurut Ragnar Nurkse, (1953) menyatakan bahwa kemiskinan yang tidak mempunyai ujung dan pangkalnya yang mana semua unsur yang menyebabkan kemiskinan akan saling berhubungan. Serta dimana pendidikan memiliki dampak

terhadap kualitas sumber daya. Pendidikan yang rendah bisa mengakibatkan kualitas sumber daya yang rendah juga sehingga ketika kualitas sumber daya yang ada rendah maka akan berdampak pada produktivitas yang menurun. Akibat menurunnya produktivitas bisa mempengaruhi upah yang rendah juga sehingga menyebabkan kemiskinan bertambah.

Menurut Sanz, et al (2017) dalam Bintang & Woyanti, (2018) mengemukakan bahwa kemiskinan sangat mungkin bisa dipengaruhi oleh pendidikan. Dengan adanya keterbatasan dalam hal pendidikan akan menyebabkan terhalangnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan yang lebih besar. Penelitian yang dilakukan oleh Hong & Pandey, (2017) mengemukakan bahwa penduduk dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi memiliki kemungkinan yang lebih kecil untuk menjadi miskin, hal ini menjadi salah satu penentu dalam penurunan tingkat kemiskinan yaitu faktor pendidikan.

Pentingnya pendidikan dalam pengentasan kemiskinan memberikan dampak seperti semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk, maka semakin sedikit jumlah penduduk miskin karena pendidikan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang mendukung upah yang lebih tinggi. Berikut tabel anggaran pendidikan yang dialokasikan oleh pemerintah untuk pendidikan, dapat dilihat pada tabel 1.2

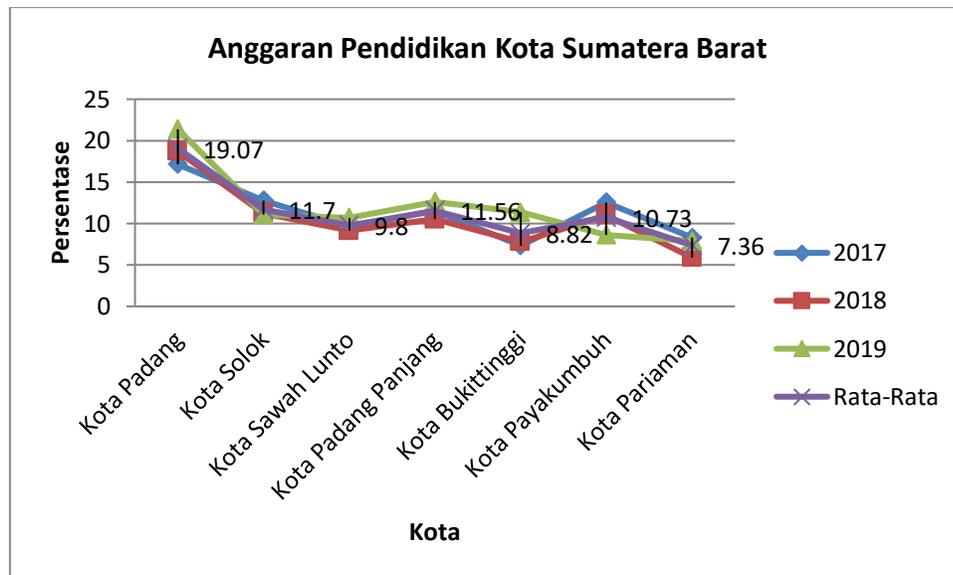
Grafik 1.4 Alokasi Anggaran Pendidikan di Kabupaten Sumatera Barat.



Sumber Data : Neraca Anggaran Pendidikan

Berdasarkan grafik 1.4 diatas menunjukkan bahwa persentase anggaran pendidikan Kabupaten di Sumatera Barat tahun 2017-2019 mengalami flutuasi. Dapat dilihat dimana rata-rata persentase anggaran pendidikan tertinggi di kabupaten berada di Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu rata-ratanya sebesar 17,98 persen, sedangkan rata-rata persentase anggaran pendidikan terendah di kabupaten berada di Kabupaten Solok Selatan yaitu rata-ratanya sebesar 7,37 persen.

Grafik 1.5 Alokasi Anggaran Pendidikan di Kota Sumatera Barat.



Sumber Data : Neraca Anggaran Pendidikan

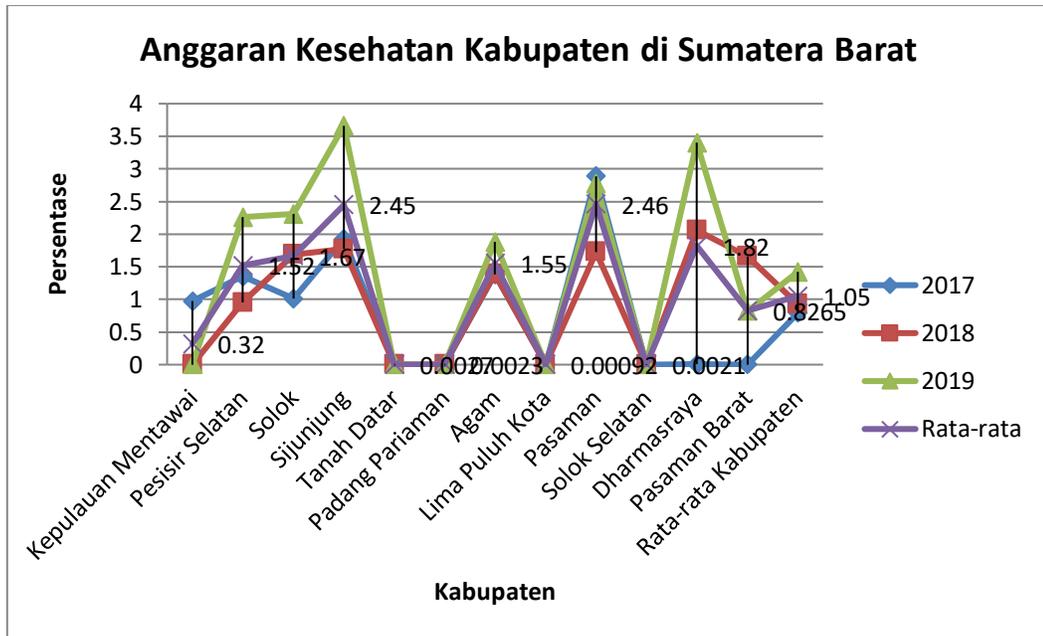
Berdasarkan grafik 1.5 diatas menunjukkan bahwa persentase anggaran pendidikan Kota di Sumatera Barat mengalami fluktuasi dari tahun 2017 sampai tahun 2019. Dilihat dimana rata-rata persentase anggaran pendidikan tertinggi di kota berada di Kota Padang yaitu sebesar 19,07 persen. Sedangkan rata-rata persentase anggaran pendidikan terendah di kota berada di Kota Pariaman yaitu sebesar 7,36 persen.

Penyaluran alokasi dana pendidikan dalam pasal 49 UU Nomor 20 tahun 2003 pasal 1 menetapkan minimal 20% dari belanja negara dan belanja daerah untuk anggaran pendidikan. Maka dari itu pemerintah harus meningkatkan lagi kualitas

pendidikan di lingkungan masyarakat, serta melakukan pemerataan pendidikan agar semua kalangan masyarakat dapat mengenyam pendidikan yang sama. Dengan hal ini dapat kita perhatikan pada grafik penduduk miskin kabupaten dan kota serta grafik anggaran pendidikan kabupaten dan kota terdapat tren anggaran pendidikan dibarengi dengan tren kemiskinan, dimana tren anggaran pendidikan di Sumatera Barat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, sementara tren kemiskinan di Sumatera Barat dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Maka dari itu tren anggaran pendidikan dengan tren kemiskinan saling berkaitan. Jika seseorang memiliki pendidikan yang lebih tinggi maka seseorang tersebut akan memilih pekerjaan yang lebih bagus dengan keterampilan yang dia punya dengan penghasilan pendapatan yang lebih tinggi yang akan dia terima maka angka kemiskinan bisa teratasi secara bertahap.

Selain pendidikan, kesehatan juga berkaitan dengan kemiskinan dimana kesehatan ialah suatu investasi dalam sumber daya manusia yang bisa mendorong masyarakat dalam mencapai kesejahteraan sehingga kemiskinan bisa teratasi. Maka sebab itu kesehatan menjadi perhatian pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik, hal ini bisa di lihat dari anggaran kesehatan yang di berikan pemerintah dalam grafik dibawah ini.

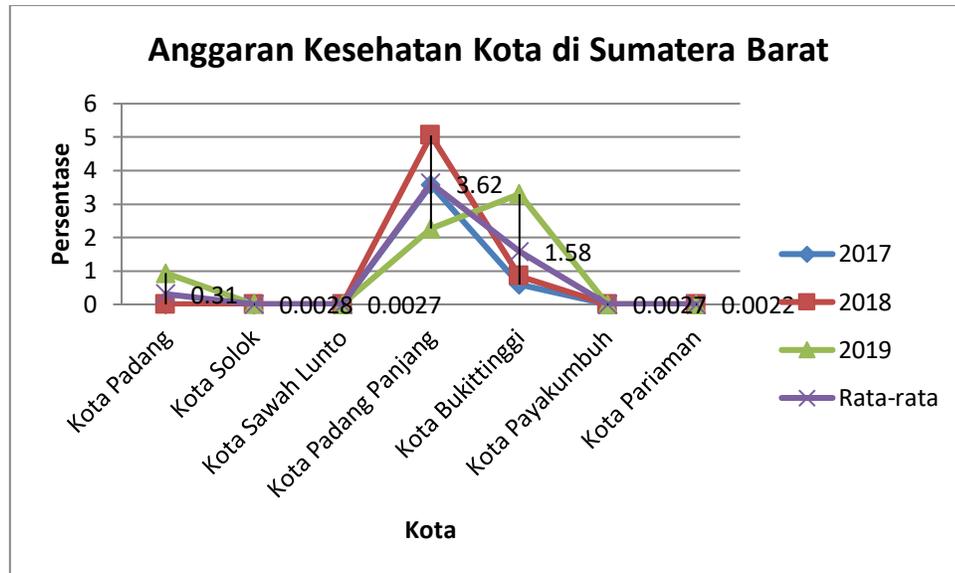
Grafik 1.6 Alokasi Anggaran Kesehatan di Kabupaten Sumatera Barat.



Sumber data : Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan grafik 1.6 diatas menunjukkan bahwa persentase anggaran kesehatan kabupaten di Sumatera Barat mengalami fluktuasi dari tahun 2017 sampai tahun 2019. Dilihat dimana rata-rata persentase anggaran kesehatan tertinggi di kabupaten berada di Kabupaten Pasaman yaitu rata-ratanya sebesar 2,46 persen, sedangkan rata-rata persentase anggaran kesehatan terendah di kabupaten berada di Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu rata-ratanya sebesar 0,00092 persen.

Grafik 1.7 Alokasi Anggaran Kesehatan di Kota Sumatera Barat.



Sumber data : Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan grafik 1.7 diatas menunjukkan bahwa persentase anggaran kesehatan kota di Sumatera Barat mengalami fluktuasi dari tahun 2017 sampai tahun 2019. Dilihat dimana rata-rata persentase anggaran kesehatan tertinggi di kota berada di Kota Padang Panjang yaitu sebesar 3,62 persen. Sedangkan rata-rata persentase anggaran kesehatan terendah di kota berada di Kota Pariaman yaitu sebesar 0,0022 persen.

Kesehatan merupakan modal dasar untuk pelaksanaan pembangunan ekonomi, dengan seseorang mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik maka dapat

mengurangi kemiskinan dimana kesehatan yang baik akan meningkatkan produktivitas kelompok miskin.

Alokasi dana desa juga mengalokasikan 10% dana desa untuk kesehatan dan pendidikan, dana yang dialokasikan untuk pendidikan digunakan kepada pembenahan sekolah PAUD di pedesaan, sedangkan untuk kesehatan alokasi dana desa digunakan untuk posyandu, berbeda dengan anggaran pendidikan yang dananya dialokasikan untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS), bantuan bidikmisi atau KIP serta Program Indonesia Pintar (PIP), sedangkan anggaran kesehatan digunakan untuk memperbaiki pembangunan fasilitas kesehatan rumah sakit ataupun puskesmas. Bila seseorang mendapatkan kesehatan dan nutrisi yang lebih baik maka membuat usia masuk sekolah lebih dini dan absensi sekolah lebih sedikit serta pembelajaran lebih efektif, dengan demikian angka kemiskinan bisa berkurang secara bertahap. Hal ini terlihat bahwa alokasi dana desa, pendidikan dan kesehatan berkaitan erat dengan angka kemiskinan. Inilah yang menjadi hal menarik untuk pentingnya dilakukan analisis lebih lanjut dalam penelitian ini guna untuk mendapatkan hasil mengenai bagaimana kemiskinan dapat diatasi dengan program alokasi dana desa, pendidikan dan kesehatan. Apakah memberikan dampak yang positif bagi kemiskinan yang menjadi sasaran dalam pengetasan kemiskinan pada masyarakat. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti mengenai **“Peran Alokasi Anggaran Pemerintah Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Sumatera Barat”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti masalah diantaranya:

1. Sejuahmana pengaruh alokasi dana desa terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Sumatera Barat?
2. Sejuahmana pengaruh anggaran pendidikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Sumatera Barat?
3. Sejuahmana pengaruh anggaran kesehatan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Sumatera Barat?
4. Sejuahmana pengaruh alokasi dana desa, anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas maka tujuan dari penelitian ini diantaranya :

1. Untuk mengetahui pengaruh alokasi dana desa terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui pengaruh anggaran pendidikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Sumatera Barat.
3. Untuk mengetahui pengaruh anggaran kesehatan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Sumatera Barat.

4. Untuk mengetahui pengaruh alokasi dana desa, anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Sumatera Barat.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan berguna bagi :

1. Untuk pengembangan ilmu ekonomi pembangunan, khususnya dalam mengambil kebijakan publik.
2. Untuk pengembangan kebijakan pemerintah Sumatera Barat dan Badan Pusat Statistik Sumatera Barat.
3. Bagi peneliti lebih lanjut yang meneliti tentang alokasi dana desa, anggaran pendidikan, anggaran kesehatan dan kemiskinan.
4. Bagi penulis sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Negeri Padang.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Kemiskinan

a. Definisi Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan multidimensi, kemiskinan bukan hanya kurangnya pendapatan, akan tetapi juga ketiadaan kebutuhan dasar, pendidikan dan kesehatan (Ahmad et al, 1990 & Bank Dunia, 2001) dalam (Taruno, 2019).

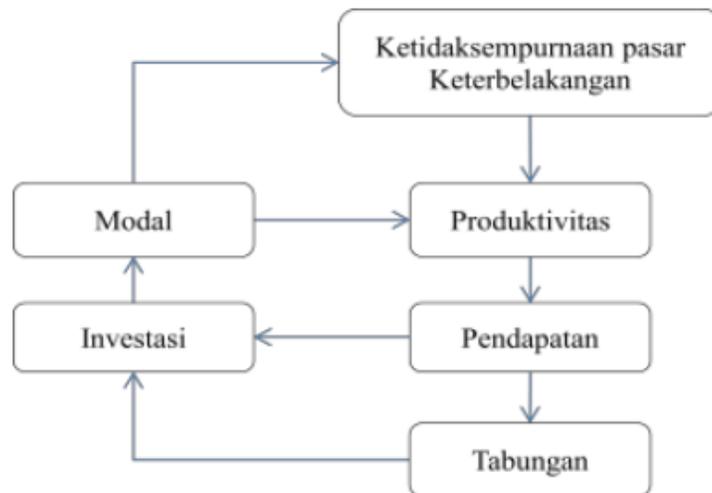
Kemiskinan merupakan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok yang meliputi tempat tinggal, makanan, pakaian, pendidikan dan kesehatan. BPS, (2019) mendefinisikan kemiskinan dengan standar garis kemiskinan guna dapat mengukur kemiskinan absolut.

Menurut Todaro, (2011) kemiskinan absolut adalah dimana situasi ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasarnya yang terdiri dari sandang, pangan, dan papan. Seseorang yang dikatakan miskin secara absolut apabila tingkat pendapatannya berada dibawah garis kemiskinan atau sejumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal, antara lainnya pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Secara khusus kemiskinan dapat diukur

dengan membandingkan pendapatan atau konsumsi setiap individu dengan beberapa standar yang telah ditentukan dimana mereka telah dianggap miskin apabila pendapatan atau konsumsi mereka berada dibawah standar tersebut (Haughton & Khandker, 2012).

b. Lingkaran Setan Kemiskinan

Ragnar Nurkse, (1953) menyatakan bahwa kemiskinan yang tidak mempunyai ujung dan pengkalnya yang mana semua unsur yang menyebabkan kemiskinan akan saling berhubungan.



Gambar 2.1 Lingkaran Setan kemiskinan (Ragnar Nurkse, 1953)

Dari gambar 2.1 diatas memperlihatkan kemiskinan dan ketidakefektifan pasar menyebabkan rendahnya produktivitas. Produktivitas yang rendah mengakibatkan pendapatan masyarakat menurun sehingga kemampuan masyarakat untuk tabungan dan

investasi berkurang. Berkurangnya investasi berakibat pada rendahnya modal. Rendahnya modal akan menyebabkan ketidaksempurnaan pasar dan terjadinya keterbelakangan. Hal tersebut terus bergerak melingkar sehingga tidak mempunyai ujung dan pangkalnya.

c. Penyebab Kemiskinan

Menurut Ginanjar Karasasmita, (1996) mengemukakan bahwa kondisi kemiskinan disebabkan oleh empat penyebab diantaranya :

1) Rendahnya taraf pendidikan.

Taraf pendidikan yang rendah dapat mengakibatkan terbatasnya kemampuan pengembangan diri seseorang dan menyebabkan sulitnya mencari lapangan pekerjaan. Persaingan di lapangan pekerjaan juga ditentukan oleh taraf pendidikan. Apabila taraf pendidikan yang rendah akan menyebabkan terbatasnya kemampuan untuk mencari dan memanfaatkan peluang.

2) Rendahnya tingkat kesehatan.

Taraf kesehatan dan gizi rendah mengakibatkan rendahnya daya tahan fisik, daya pikir dan prakarsa.

3) Terbatasnya lapangan kerja.

Keadaan dalam kemiskinan disebabkan oleh kondisi pendidikan dan kesehatan diperberat dengan keterbatasan lapangan pekerjaan.

Selama ada lapangan pekerjaan, maka selama itulah ada harapan untuk memutuskan lingkaran setan kemiskinan.

4) Kondisi keterisolasian

Penduduk miskin secara ekonomi tidak berdaya disebabkan oleh tempat terpencil dan terisolasi, dimana mereka hidup dari ketidakterjangkauan pelayanan pendidikan yang baik, kesehatan yang rendah, dan gerak kemajuan yang dinikmati masyarakat lainnya.

Menurut Robert Chambers, (1983) mengatakan bahwa ada faktor penyebab terjadinya kemiskinan antara lain:

1) Faktor internal

Faktor internal dimana kebutuhan harus terpenuhi namun tidak memiliki kemampuan yang cukup dalam berusaha mengelola sumber daya yang dimiliki. Hal ini disebabkan oleh kurangnya keterampilan, dan tingkat pendidikan yang rendah.

2) Faktor eksternal

Faktor eksternal disebabkan oleh bencana alam seperti krisis ekonomi, serta tidak adanya pemihakan berupa kebijakan yang memberikan peluang dan kesempatan bagi masyarakat miskin.

d. Hubungan Kemiskinan Dengan Pendidikan.

Keterkaitan kemiskinan dengan pendidikan sangatlah erat dimana pendidikan memberikan kemampuan dalam menguasai ilmu dan

keterampilan, pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kemiskinan.

Pendidikan adalah tujuan pembangunan yang mendasar, dimana pendidikan memainkan peranan penting dalam membentuk kemampuan sebuah negara yang berkembang dalam menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar terciptanya pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan (Todaro, 2011). Pendidikan berhubungan dengan kemiskinan dimana seseorang yang memiliki jenjang pendidikan yang tinggi akan memperoleh pendapatan yang lebih baik dan sebaliknya.

Teori *Human Capital* dalam (Nurkholis, 2016) mengemukakan bahwa suatu pemikiran yang menganggap bahwa manusia harus memiliki keahlian, pengetahuan, skill, kemampuan dan sikap, sehingga dapat mencapai kesejahteraan.

Menurut JE Stiglitz, (1975) menyatakan bahwa pendidikan adalah mengidentifikasi kemampuan individu yang berbeda, dimana mereka yang sekolah lebih lama menerima upah yang lebih tinggi dan terlihat lebih produktif. Ini bukan karena sekolah telah meningkatkan produktivitas mereka, melainkan karena sekolah telah mengidentifikasi individu-individu yang paling produktif, atau yang memiliki dorongan dan ambisi yang diperlukan. Sistem sekolah dipandang sebagai perangkat penyaringan, memisahkan yang sangat

mampu dan bermotivasi tinggi dari yang kurang mampu dan kurang termotivasi.

e. Hubungan Kemiskinan Dengan Kesehatan

Keterkaitan kemiskinan dengan kesehatan merupakan suatu hubungan timbal balik yang tidak bisa dipisahkan antara keduanya. Kesehatan yang buruk dapat mengakibatkan kemiskinan dan kemiskinan juga berpotensi besar membawa pada status kesehatan yang rendah.

Menurut Arsyad, L (1999) menyatakan bahwa intervensi untuk memperbaiki kesehatan dari pemerintah merupakan salah satu alat kebijakan penting dalam mengurangi kemiskinan. Faktor yang mendasari kebijakan tersebut ialah perbaikan kesehatan akan meningkatkan produktivitas kelompok miskin.

2. Alokasi Anggaran Pemerintah

Menurut Hayek, (1945) dan Musgrave, (1956) menyatakan bahwa kebijakan dalam mengalokasikan pengeluaran pemerintah terhadap pelayanan publik akan lebih efisien apabila ditangani oleh pemerintah daerah. Pengeluaran pemerintah merupakan pengeluaran rutin yang telah ditentukan dalam kebijakan pemerintah, pengeluaran pemerintah ini ditujukan untuk membiayai pembangunan.

Menurut Klasen, (2011) pengeluaran pemerintah bagian instrumen penting dalam mengurangi kemiskinan. Ada beberapa pengeluaran pemerintah yang dapat diidentifikasi memiliki pengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap kemiskinan diantaranya pengeluaran untuk pendidikan, kesehatan, teknologi, infrastruktur dan lain-lain.

Menurut Wilhelm & Flestas, (2005) dalam (Taruno, 2019) menyatakan bahwa alokasi anggaran juga merupakan instrumen kunci bagi pemerintah untuk mendorong pembangunan ekonomi dan mengurangi kemiskinan absolut. Kemiskinan dapat dikurangi dengan mengalokasikan sumber daya yang langka. Sumber daya hanya dapat didistribusikan secara efisien dan adil jika dialokasikan oleh pemerintah, melalui produksi barang-barang yang berpihak pada masyarakat miskin (Samuelson, 1954 & Musgrave 1956) dalam (Adegboyo, 2020). Menurut Musgrave, (1956) mendefinisikan fungsi keuangan publik sebagai alokasi sumber daya, redistribusi dan stabilisasi ekonomi makro.

Kebijakan umum belanja publik Indonesia dalam APBN 2017 akan diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan, antara lain melalui upaya yang memacu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kualitas, pengurangan kemiskinan, pengurangan pengangguran dan pengendalian inflasi. Selain itu, pemerintah juga akan terus menajamkan efisiensi dan efektivitas belanja pemerintah pusat dalam rangka peningkatan kualitas pengeluaran publik (Jaelani, 2017).

Pemerintah juga mengalokasikan anggarannya terhadap alokasi dana desa, pendidikan dan kesehatan seperti :

1) Alokasi dana desa

Alokasi dana desa merupakan alokasi anggaran untuk desa yang berasal dari belanja pusat atau daerah yang dilakukan dengan mengefektifkan kegiatan program yang berbasis desa secara merata dan adil. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan. Alokasi dana desa adalah anggaran yang digunakan pemerintah desa dalam memperdayakan masyarakat serta melakukan pembangunan yang dikelola langsung oleh pemerintah desa dan masyarakat (Prasetyo, 2012).

2) Anggaran pendidikan

Anggaran pendidikan merupakan pengeluaran dana belanja pemerintah dalam pendidikan yang mencerminkan upaya pemerintah memberikan pelayanan terhadap bidang pendidikan.

3) Anggaran kesehatan

Undang-Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, bahwa pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Pasal 171 ayat (2) dan (3) menjelaskan bahwa besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% dari anggaran

pendapatan dan belanja daerah di luar gaji, serta diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan publik lebih kurang sebanyak 2/3 (dua pertiga) dari anggaran kesehatan dalam anggaran pendapatan, serta belanja negara dan daerah.

Alokasi anggaran kesehatan ditujukan pada pelayanan kesehatan dalam bidang pelayanan publik, terutama untuk penduduk miskin, kelompok lanjut usia dan anak terlantar.

B. Penelitian Terdahulu

Sebelum melaksanakan penelitian ini, penulis membutuhkan hasil penelitian terdahulu yang bisa digunakan sebagai referensi dan juga melihat apakah penelitian terdahulu memiliki hubungan dengan penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu yang penulis jadikan referensi sebagai berikut :

No	Nama	Judul	Hasil
1	Fitri Amalia, (2012)	Pengaruh Pendidikan, Pengangguran dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kawasan Timur Indonesia (KTI) Periode 2001-2010.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan berpengaruh secara positif terhadap kemiskinan di KTI.
2	Miftakhul &	The Influence	Hasil penelitian ini

	Prasetyo, (2016)	Between Government Expenditure Towards Poor Resident in Indonesia.	menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah untuk fungsi kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia. Dan variabel pengeluaran pemerintah fungsi pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia.
3	Aan Jaelani, (2017)	Public Expenditure Management in Indonesia: Islamic Economic Review on State Budget 2017	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran publik digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip kepentingan umum. Pengeluaran publik ini sebagai alat yang efektif untuk mengalihkan sumber daya ekonomi dan meningkatkan pendapatan masyarakat secara keseluruhan.

4	Nilam, Dwi, & Syamsul Hadi (2017)	Pengaruh Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Belanja Modal dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Timur.	Hasil penelitian ini menunjukkan alokasi dana desa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan kabupaten/kota. Koefisien sebesar -3,59 memberikan indikasi jika setiap penambahan 1% alokasi dana desa maka akan menurunkan kemiskinan kabupaten/kota sebesar 3,59%.
5	Asih Handayani, (2018)	Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kesehatan dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2002-2005.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan dan kesehatan memiliki korelasi negatif terhadap variabel kemiskinan.
6	Dianti, Amran & Ita (2018)	Pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa alokasi dana desa tidak signifikan secara statistik terhadap tingkat kemiskinan.

		Talud.	
7	Ratna Sari Dewi dan Ova Novi Irama, (2018)	Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Kemiskinan studi khusus Di Provinsi Sumatera Utara.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alokasi dana desa berpengaruh positif secara signifikan, dan hasil penelitian alokasi dana desa ini merupakan salah satu pendapatan yang memiliki pengaruh dalam mengentaskan kemiskinan di pemerintah desa.
8	Hendrawan Toni Taruno, (2019)	Public Spending and Poverty Reduction in Indonesia: The Effects of Economic Growth and Public Spending on Poverty Reduction in Indonesia 2009-2018	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran publik untuk sektor kesehatan dan pendidikan memiliki pengaruh yang sedikit berbeda terhadap pengurangan kemiskinan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Secara meyakinkan, alokasi belanja untuk kesehatan dan pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan di pedesaan,

			sedangkan penurunan angka kemiskinan di perkotaan kemungkinan besar lebih dipengaruhi oleh pengeluaran untuk kesehatan.
9	M. Rimawan & Fenny Aryani (2019)	Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia Serta Kemiskinan di Kabupaten Bima.	Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwasanya alokasi dana desa tidak memiliki pengaruh terhadap kemiskinan, hal ini menunjukkan alokasi dana desa belum mampu mengurangi kemiskinan dikarenakan program pemerintah yang tetap mendahulukan infrastruktur sehingga lupa memperhatikan program peberdayaan masyarakat.
10	Nadia Islami & Ali Anis, (2019)	Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Indonesia.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia sedangkan kesehatan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di

			Indonesia.
11	Olufemi Samuel Adegboyo, (2020)	Does government spending reduce poverty in Nigeria? Evidence from AutoRegressive Distributed Lag Specificatio.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran berulang layanan ekonomi, pengeluaran berulang sosial dan masyarakat, pengeluaran berulang Transfer mengurangi kemiskinan sementara <i>Transfer Capital Expenditure</i> (TCX) dan administrasi berulang pengeluaran meningkatkan kemiskinan.

C. Kerangka Konseptual

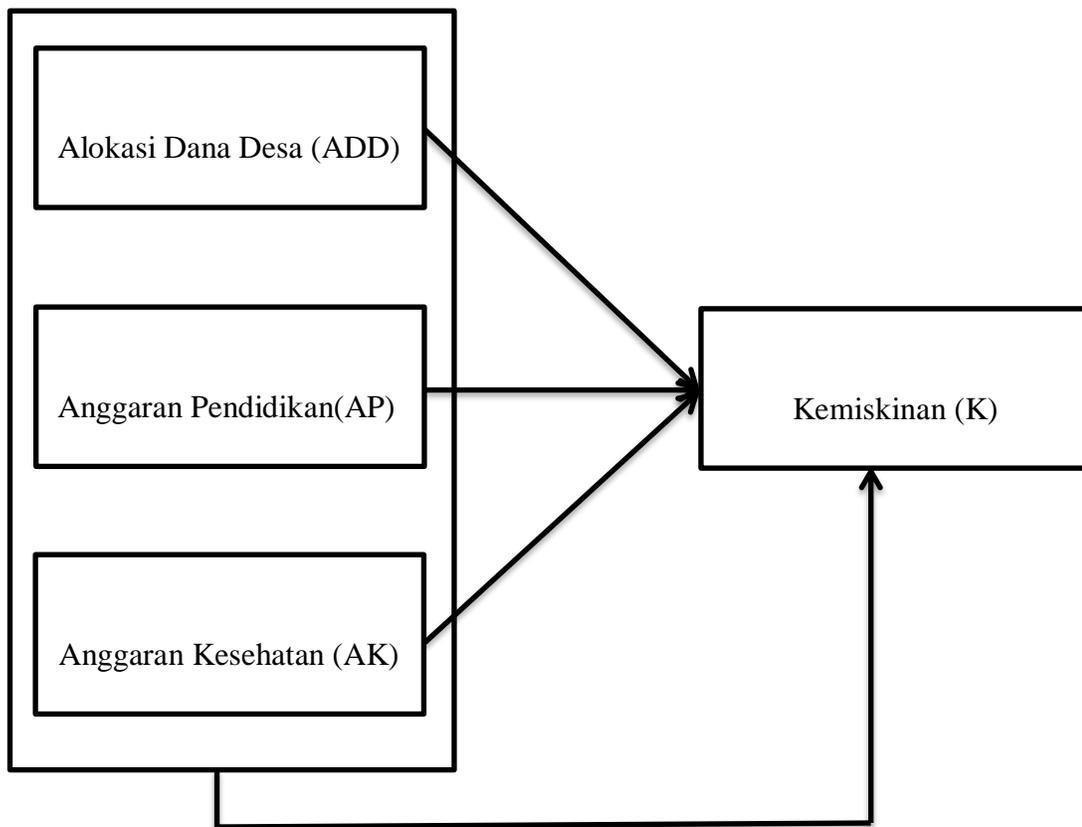
Kerangka konseptual dapat mendeskripsikan dan menentukan keterkaitan antar variabel penelitian yang merujuk berdasarkan pada batasan dan rumusan masalah dengan berpijak pada kajian teori di atas. Variable yang akan dibahas yaitu alokasi dana desa (X1), anggaran pendidikan (X2), anggaran kesehatan (X3) yang merupakan variabel bebas dan kemiskinan (Y) yang merupakan variabel terikat.

Alokasi dana desa (X1) diduga mempunyai pengaruh positif terhadap kemiskinan (Y), artinya melalui pelaksanaan alokasi dana desa yang baik maka akan mengentaskan kemiskinan.

Anggaran pendidikan (X2) diduga mempunyai pengaruh positif terhadap kemiskinan (Y), artinya melalui pendidikan dapat mengurangi angka kemiskinan.

Anggaran kesehatan (X3) diduga mempunyai pengaruh positif terhadap kemiskinan (Y), artinya melalui kesehatan yang baik dapat mengurangi angka kemiskinan.

Berikut ini dapat digambarkan kerangka konseptual sebagai berikut :



Gambar 1 : Kerangka Konseptual Peran Alokasi Anggaran Pemerintah Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Sumatera Barat.

D. Hipotesis

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dirumuskan diatas, maka dapat dibuat hipotesis diantaranya :

1. Alokasi dana desa berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Sumatera Barat.
2. Anggaran pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Sumatera Barat.
3. Anggaran kesehatan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Sumatera Barat.
4. Secara bersama-sama alokasi dana desa, anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Sumatera Barat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini mengkaji peran anggaran pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan di Sumatera Barat. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh beberapa kesimpulan diantaranya sebagai berikut.

1. Alokasi Dana Desa berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Sumatera Barat. Dengan probabilitas $0,8613 > \alpha = 0,05$ dan hipotesis yang menyatakan bahwa alokasi dana desa berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Sumatera Barat ditolak. Artinya ketika terjadi penurunan alokasi dana desa maka kemiskinan akan meningkat di Kabupaten/Kota Sumatera Barat.
2. Anggaran pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Sumatera Barat. Dengan probabilitas $0,0048 < \alpha = 0,05$ dan hipotesis yang menyatakan bahwa anggaran pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Sumatera Barat diterima. Artinya ketika terjadi peningkatan anggaran pendidikan maka kemiskinan akan menurun di Kabupaten/Kota Sumatera Barat.

3. Anggaran kesehatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Sumatera Barat. Dengan probabilitas $0,9539 < \alpha = 0,05$ dan hipotesis yang menyatakan bahwa anggaran kesehatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Sumatera Barat ditolak. Artinya ketika terjadi penurunan anggaran kesehatan maka kemiskinan akan menurun di Kabupaten/Kota Sumatera Barat.

B. Saran

Berikut saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian penulis ini, sebagai berikut:

1. Disarankan kepada pemerintah Sumatera Barat untuk memperhatikan lagi pengelolaan alokasi dana desa guna untuk mengentaskan kemiskinan.
2. Disarankan kepada pemerintah pusat agar dapat menambahkan lagi anggaran alokasi dana desa agar lebih bisa memadai desa atau nagari.
3. Disarankan kepada perangkat pengelola desa bahwa anggaran dana desa agar dapat dioptimalkan untuk pemberdayaan sehingga bisa mengurangi kemiskinan.
4. Diharapkan pemerintah dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran pendidikan agar dapat meningkatkan mutu pendidikan sehingga seseorang memiliki kualitas dan keterampilan dalam dunia kerja.

5. Diharapkan anggaran alokasi dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa agar tepat sasaran supaya tidak terjadi ketimpangan antara sesama masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adegboyo, O. S. (2020). Does government spending reduce poverty in Nigeria? Evidence from Auto-Regressive Distributed Lag Specification. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 7(2), 86–90.
<https://doi.org/10.19184/ejeba.v7i2.17322>
- Arsyad, L. (1999). *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah* (Edisi Pert). BPFE. Yogyakarta.
- Azizah, E. W., Sudarti, & Kusuma, H. (2018). The Influence of Education, Income Per Capita and Population Against Poverty in East Java Province. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(1), 167–180.
<http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jie/article/view/6976>
- Bintang, A. B. M., & Woyanti, N. (2018). Pengaruh PDRB, Pendidikan, Kesehatan, Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Jawa Tengah (2011-2015). *Media Ekonomi Dan Manajemen*, 33(1), 20–28.
<https://doi.org/10.24856/mem.v33i1.563>
- BPS. (2019). *Kemiskinan: Indonesia*. Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2019). *Alokasi Dana Desa Sumatera Barat 2015-2019*. Badan Pusat Statistik. Sumatera Barat.
- BPS. (2019). *Persentase Anggaran Kesehatan Kab/Kota di Sumatera Barat 2015-*